PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTOR DISTRO BENGKULU DENGAN KIP STORE BENGKULU

Ahmad Mahadi^{a1}, Sinung Hangabei^{b2},Hendi Sastra Putra³, Mikho Ardinata^{d4}

^{a1} Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d.4} Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ABSTRAK

Kata Kunci: Perjanjian
Konsinyasi, Pemasok, Distro.

Perjanjian konsinyasi adalah perjanjian dimana pemilik barang memberikan sejumlah barang tertentu kepada pihak tertentu untuk dijual dengan imbalan komisi. Pada gilirannya, pengaturan partisipasi transfer umumnya dilakukan oleh pelaku bisnis, baik organisasi skala kecil, menengah, dan yang mengejutkan, organisasi besar. Salah satu toko di Bengkulu, KIP Store, menggunakan model konsinyasi dalam menjual pakaian dan aksesoris. Banyak distro yang membagikan hasilnya kepada KIP Store Bengkulu untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian bahwa produknya akan laku di pasaran karena KIP Store sangat terkenal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi di KIP Store Bengkulu sudah sesuai dengan asas hukum perjanjian dan bagaimana pemasok terlindungi dari kerusakan barang yang disebabkan oleh pelanggan atau seiring berjalannya waktu. Eksplorasi ini merupakan penelitian lapangan, yaitu dengan memimpin pemeriksaan secara langsung di KIP Store Bengkulu. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian deskriptif analitis ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai penerapan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi

dalam masyarakat. Data primer dan sekunder diolah, analisis kualitatif dilakukan, diskusi dilakukan, dan kesimpulan akhir diambil pada saat analisis data temuan penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, pelaksanaan perjanjian konsinyasi pada KIP Store Bengkulu didasarkan pada pertimbangan hukum melalui perjanjian lisan yang tidak tertulis. Meskipun perjanjian konsinyasi KIP Store tidak mencantumkan pernyataan pokok-pokok secara tertulis, namun bentuk perjanjiannya baku karena KIP Store, pihak yang lebih kuat kedudukannya, yang memutuskan pokok-pokok tersebut. Terdapat kontrol sepihak yang dilakukan KIP Store dalam pelaksanaan pengaturan transfer di KIP Store Bengkulu yang seharusnya terlihat dari jaminan biaya-biaya penting bagi penyedia layanan dan hal ini tidak sesuai dengan standar kepastian hukum dan pedoman kebebasan yang setara. Pemasok menerima kembali barang yang tidak terjual akibat kerusakan tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum apabila barang tersebut rusak karena kesalahan konsumen yang tidak diketahui identitasnya atau dalam jangka waktu yang lama.

ABSTRACT

Keywords:

Consignment Agreement,
Supplier, Distro.

A consignment agreement is an agreement where the owner of goods gives a certain number of goods to a certain party to sell in exchange for a commission. In turn, transfer participation arrangements are generally carried out by business actors, both small, medium and large organizations. One of the shops in Bengkulu, namely KIP Store, uses a consignment model in selling clothes and accessories. Many distros share their results with KIP Store Bengkulu to get comfort and certainty that their products will sell on the market because KIP Store is very famous. The purpose of this research is to find out whether the implementation of consignment agreements at KIP Store Bengkulu is in accordance with the legal principles of agreements and how suppliers are protected from damage to goods caused by customers or over time. This exploration is field research, namely by leading a direct inspection at the KIP Store Bengkulu. Observation, interviews and documentation are the methods used to collect data in this analytical descriptive research. This research uses an empirical normative approach, namely legal research regarding the application of normative legal provisions to each specific legal event that occurs in society. Primary and secondary data were processed, qualitative analysis was carried out, discussions were held, and final conclusions were drawn during the data analysis of the findings of this research. Based on research findings, the implementation of consignment agreements at KIP Store Bengkulu is based on legal considerations through unwritten verbal agreements. Even though the KIP Store consignment agreement does not contain a written statement regarding the main points, the form of the agreement is standard because KIP Store, the party with a stronger position, decides these main points. There is unilateral control carried out by KIP Store in implementing transfer arrangements at KIP Store Bengkulu which should be seen from the guarantee of important costs for service providers and this is not in accordance with legal certainty standards and equal freedom guidelines. Suppliers accept unsold goods back because they are damaged as a form of legal protection if the goods are damaged due to unknown consumer error or over a long period of time.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi di mana satu pihak dan pihak lain bersama-sama berjanji dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu disebut kesepakatan. Keterlibatan adalah hubungan yang berkembang sebagai hasil dari ini. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikat diri dengan satu atau lebih orang lain." Para pihak yang menandatangani perjanjian kemudian akan terikat oleh perjanjian tersebut.¹

Dalam praktik sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, perjanjian kerja sama memiliki nama tersendiri, namun peraturan dan pedoman di Indonesia belum mengatur hal ini, karena sampai saat ini belum ada pedoman khusus yang diberikan terkait hal ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUH Hukum Umum atau selanjutnya disebut KUHP Hukum Adat,

Ada dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang memiliki nama luar biasa yang diberikan oleh peraturan, yaitu perjanjian yang diberi nama (Benoemde/Nomininaatcontracten) dan perjanjian tanpa nama (Onbenoemde/innominaatcontracten) adalah konsep yang tidak memiliki nama tertentu.²

Hukum kontrak nominal, juga dikenal sebagai kontrak bernama, dan hukum kontrak nominasi, juga dikenal sebagai kontrak anonim, adalah dua kategori hukum kontrak. Pengaturan kontrak innominate diatur dalam Kode Umum, mengenai pasal dalam Kode Umum yang mengatur hal ini, lebih khusus lagi dalam Pasal 1319 Kode Umum, yang berbunyi: "Semua perjanjian, apakah memiliki nama yang luar biasa atau bersifat luar biasa yang tidak dikenal dengan nama khusus atau nama tertentu, tergantung pada pedoman.³

Sementara itu, perjanjian anonim atau yang disebut innominaat adalah kumpulan standar hukum yang melihat berbagai perjanjian yang dibuat dan dibina di mata publik dan tidak ada pedoman khusus dalam Common Code. Mengingat standar kesempatan untuk kesepakatan, kontrak innominaat lebih dikenal secara lokal, oleh karena itu kontrak dinilai tidak terlalu bebas dalam membuat dan menyusun perjanjian karena ada batasan kepentingan rapat dan juga sesuai dengan pedoman hukum. Pedoman untuk kesempatan untuk kesepakatan adalah mempertimbangkan pelaksanaan perjanjian misterius atau innominaat.⁴

Transfer dapat diartikan sebagai pemilik mempercayakan produknya kepada pihak lain untuk dijual dengan syarat yang disepakati bersama. Prof. Dr, Mas'ud Machfoedz., transfer adalah penawaran produk di mana pembuat/pedagang barang dagangan yang ditawarkan kepada pembeli didistribusikan ke pengecer yang

¹ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

² ' Sri Rahayu, "Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada Pt. Down To Earth.", *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 1, No. 2 (2018), 240-254.

³ ' Kasiyanto Agus, *Mahir Merancang Kontrak*, Bandung: Eureka Media Aksara, 2022.

⁴ Sutrawaty, Laras. "Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Legal Opinion*, vol. 4, no. 3, 2016.

berbeda di mana pengecer mendapatkan komisi atas produk yang dijual.⁵

Hadori Yumus Harmanto, Transfer adalah kesepakatan antara dua pihak di mana pemilik produk menyerahkan berbagai barang dagangan kepada pihak yang bekerja sama untuk diiklankan dan dijual dengan memberikan komisi yang disepakati. Ritonga Cici Tria Fauziah.⁶

Menurut A, Waluyo Jati, konsinyasi adalah penyerahan barang kepada pihak lain, bertindak sebagai agen penjual dengan kesepakatan bahwa hak atas barang tersebut ada di pemiliknya selama barang belum terjual.⁷

Darsono mengatakan, konsinyasi adalah ketika pemilik menyerahkan barangnya kepada pihak lain untuk dijual sesuai kesepakatan. Pengertian transfer tersebut berisi keistimewaan dan komitmen kedua pemain. Pihak penerima barang disebut penerima barang atau komisaris, dan penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan konsinyasi.⁸

1.2 Metode Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan, penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama selain data sekunder (materi hukum). Karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang menjadi dasar utama untuk melakukan penelitian, maka menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian sangat penting. Oleh karena itu, memilih jenis penelitian yang tepat penting karena mempengaruhi seluruh proses penelitian.

Jenis penelitian ini menyarankan untuk menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau disebut juga penelitian lapangan atau penelitian empiris, adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di lembaga non-perpustakaan, komunitas, atau negara. Hal ini dilakukan dengan melihat fenomena yang ada di masyarakat.⁹

PEMBAHASAN

2.1 Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Pemasok dan Distributor di Distro Toko Baju Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak

Dalam kebanyakan kasus, perjanjian tidak harus dalam bentuk tertentu; itu bisa dibuat secara lisan atau tertulis, yang keduanya bisa menjadi bukti dalam pernikahan.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan atau dengan kesepakatan sepanjang memenuhi persyaratan perjanjian yang sah dalam

⁵ Mas"ud Machfoedz, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011, hlm 55

⁶ Hadori Yunus Harmanto, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 129

⁷ Waluyo Jati "Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) Dengan Supplier." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

⁸ Darsono, *Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993

⁹ Bahder Johan Nasution, *"Metode Penelitian Ilmu Hukum"* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

Pasal 1320 KUHPerdada.¹⁰, namely;

1. Perjanjian mereka yang mengikat mereka Kesepakatan para pihak disederhanakan menjadi perjanjian yang mengikat mereka. Menurut satu interpretasi, istilah "perjanjian" menunjukkan bahwa para pihak dapat dengan bebas mengatur pemikiran mereka mengenai tujuan utama perjanjian. Dalam skenario ini, kesepakatan dapat diungkapkan secara eksplisit atau diam-diam, tetapi masing-masing pihak harus memiliki kehendak bebas (sukarela) untuk mengikat diri. Bebas dari kesalahan, paksaan, dan penipuan adalah apa artinya.

Dengan asumsi ada unsur kesalahan, paksaan, atau pemerasan, ini berarti mengabaikan ketentuan perjanjian yang sah. Pasal 1321 KUH Perdata mendefinisikan ketentuan ini sebagai berikut: "Tidak ada perjanjian yang berkekuatan jika diberikan karena kesalahan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan".¹¹

2. Kemampuan untuk membuat kesepakatan; Para pihak dalam suatu perjanjian adalah subjek dalam konteks kemampuan untuk mencapai kesepakatan. Pasal 1329 KUHP Umum menyatakan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bertindak dengan pengertian, kecuali dia dinyatakan tidak kompeten untuk melakukannya. Mengenai siapa yang dianggap tidak kompeten, Pasal 1330 KUHPerdada menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia dewasa; orang-orang yang ditempatkan di bawah perwalian; wanita yang sudah menikah dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh hukum; dan secara umum siapa pun yang dilarang oleh hukum untuk membuat perjanjian tertentu.¹²

3. Hal tertentu; Mengenai topik atau hal tertentu, itu menyiratkan apa pemahaman atau kesepakatan kedua pemain. Intinya, jenis barang yang disebutkan dalam perjanjian ditentukan, yaitu barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUHP yang menyatakan bahwa barang pokok yang dapat dipertukarkan dapat bersifat pengertian.

Kemudian, Pasal 1333 KUHP berarti bahwa suatu pengaturan pada dasarnya harus memiliki sesuatu yang pada dasarnya ditentukan dalam jenis. Jumlah barang yang diperdagangkan tidak perlu dikonfirmasi, durasi jumlah tidak dapat diselesaikan atau ditentukan secara penuh.

4. Ada alasan yang tidak dilarang.¹³

Dalam konteks suatu perjanjian, yang dimaksud dengan alasan yang tidak dilarang atau halal adalah terkait dengan isi perjanjian atau tujuan para pihak. Ketentuan perjanjian tidak boleh melanggar hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1337 KUHPerdada yang menyatakan bahwa suatu alasan dilarang jika dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum. Kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian dapat terjadi dengan didahului dengan penawaran dan penerimaan. Dalam perjanjian jual beli, perjanjian terjadi ketika pembeli menyetujui harga dan barang yang ditawarkan oleh penjual. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa perjanjian jual beli antara toko distribusi (distro) dan pemasok adalah perjanjian jual beli lisan dengan

¹⁰ Pasal 1320 KUHPerdada

¹¹ Pasal 1321 KUH Perdata

¹² Pasal 1329 KUH Perdata

¹³ Pasal 1333 KUH Perdata

menggunakan metode pembayaran konsinyasi, dengan alur tahapan perjanjian dijelaskan sebagai berikut (wawancara, 29 Juni 2024 pukul 18.30 WIB)

Alur perjanjian penjualan verbal menggunakan metode pembayaran konsinyasi antara toko distribusi (distro) dan pemasok dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemasok datang ke toko distribusi (distro) untuk menawarkan perjanjian penjualan menggunakan metode pembayaran konsinyasi, dalam hal ini pemasok bertemu dan membuat kesepakatan langsung dengan departemen inventaris dengan menunjukkan sampel produk sebagai pertimbangan;
2. Jika pemilik telah menyetujui melalui departemen inventaris, perjanjian dibuat secara lisan, termasuk jenis produk, jumlah produk, harga, jangka waktu pembayaran dan konsinyasi yang ditetapkan oleh toko distribusi (distro) sebesar 25%;
3. Barang yang disepakati dan nota pembelian dari pemasok dikirim ke toko distribusi (distro), agar barang atau produk menjadi tanggung jawab toko distribusi (distro)
4. Dalam jangka waktu pembayaran, yang biasanya 3 (tiga) bulan, jika ada produk yang terjual, toko distribusi (distro) akan segera mengirimkan uang pembayaran melalui transfer yang dilakukan langsung oleh pemilik toko distribusi (distro) dan pembayaran dapat dilakukan langsung ke toko distribusi (distro) untuk pemasok di Bengkulu dan sekitarnya. Sementara itu, terkait produk yang tidak terjual, pemasok akan diberitahu untuk menawarkan tiga opsi, yaitu:
 - a. Produk dikirim untuk dikembalikan ke supplier, terutama jenis produk yang sudah tidak kekinian lagi untuk menghindari penumpukan produk di toko distribusi (distro)
 - b. Produk dikembalikan atau ditukar oleh supplier dengan produk yang lebih baru dan lebih terkini, sehingga jenis produk selalu mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan keinginan pasar;
 - c. Produk dijual dengan menerapkan diskon atau potongan harga, tentunya dengan persetujuan supplier dan dengan perjanjian konsinyasi tetap sebesar 25% untuk toko distribusi (distro).

Metode Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli antara Toko Distribusi (Distro) dan Pemasok.

Dalam perjanjian jual beli antara toko distribusi (distro) dan pemasok, dimana toko distribusi (distro) berada pada posisi pembeli dan pemasok berada pada posisi penjual juga menggunakan metode pembayaran tertentu yang dapat saling menguntungkan. Pada umumnya, barang atau produk dari pemasok diserahkan ke toko distribusi (distro) berdasarkan kesepakatan mengenai metode pembayaran barang tersebut.¹⁴

Payment methods that are often used in distribution stores (distros), namely:¹⁵

¹⁴ Rezha, Bagian Inventory, wawancara pada 29 Juni 2024

¹⁵ UG JURNAL VOL.15 Edisi 04 April 2021, hlm14

1. Metode pembayaran pembelian langsung, yaitu produk dari supplier yang dijual di toko distribusi (distro) adalah barang yang telah dibeli secara tunai, umumnya pembelian dalam jumlah banyak akan mendapatkan diskon dari supplier. Dalam metode pembayaran pembelian langsung ini, tanggung jawab toko distribusi (distro) besar karena harus menanggung risiko kerugian jika barang tidak terjual.

2. Metode pembayaran konsinyasi, yaitu produk dari pemasok yang dijual di toko distribusi (distro) adalah barang yang pembayarannya hanya akan dilakukan jika barang telah terjual. Dalam metode pembayaran konsinyasi, tanggung jawab toko distribusi (distro) kecil karena risiko kehilangan produk ditanggung oleh pemasok, misalnya berupa penyusutan nilai produk, akumulasi produk yang kedaluwarsa dan tidak terjual, serta penurunan harga di pasar

3. Metode pembayaran barter, yaitu antara pemasok dan toko distribusi (distro) tidak melakukan pembayaran menggunakan mata uang tetapi menggunakan barter atau produk pertukaran yang bernilai sama. Dalam metode pembayaran ini hampir tidak ada risiko kerugian namun kelemahannya adalah sulit untuk menyamakan nilai produk dan tidak semua toko distribusi (distro) memproduksi barang seperti perusahaan pakaian sehingga tidak ada produk yang bisa dibarter.

Perjanjian jual beli antara toko distribusi (distro) dan supplier menggunakan metode pembayaran konsinyasi sehingga barang dikirimkan terlebih dahulu dan kemudian akan dilakukan pembayaran jika barang atau produk dari supplier telah dijual kepada pihak ketiga atau konsumen akhir.

Toko distribusi (distro) adalah pelopor dan terus menggunakan metode pembayaran konsinyasi dalam perjanjian jual beli mereka. Pada awal usahanya, toko distribusi (distro) telah menggunakan metode pembayaran pembelian langsung tetapi untuk mengikuti perkembangan mode terkini, tidak mungkin untuk terus menggunakan pembayaran pembelian langsung karena akan mengakibatkan penumpukan barang yang tidak terjual.¹⁶

Latar belakang metode pembayaran beralih menggunakan metode pembayaran konsinyasi adalah karena meningkatnya hubungan kemitraan dan rasa percaya dalam melaksanakan perjanjian, sehingga antara pemasok dan toko distribusi (distro) telah terjadi kerjasama jangka panjang berdasarkan prinsip kepercayaan dalam perjanjian lisan.

2.2 Perlindungan Hukum bagi Supplier jika terjadi kerusakan barang yang disebabkan oleh konsumen atau karena waktu

KIP Store adalah sub-perusahaan dari Distro, perusahaan induknya. Memiliki badan usaha sendiri, lengkap dengan dokumen SITU/SIUP, TDP, dan NPWP. KIP Store adalah toko di Jalan Jl yang secara khusus beroperasi di industri ritel pakaian siap pakai. Ini adalah sektor bisnis. Danau, Little Extension, Kawasan Sinagarapati, Kota Bengkulu. Pusat distribusi yang telah dibuka sejak tahun 2020 ini menjual berbagai macam pakaian, baik pakaian wanita maupun remaja, maupun pakaian pria. Toko ini menjual sepatu, jeans, topi, berbagai tas, dan

¹⁶ [Home,Archives,Vol.9,No.2,\(2022\):November:Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan](#)

aksesoris lainnya selain pakaian. Pusat distribusi yang berusia empat tahun ini saat ini menampung sejumlah besar vendor atau pemasok dari berbagai kota di Indonesia. Dengan dibukanya berbagai pusat distribusi baru, industri ritel pakaian Kota Bengkulu mengalami persaingan yang semakin ketat. Dengan berkembangnya usaha di area outlet distribusi di Kota Bengkulu, hal ini mendorong distro untuk meningkatkan standar kualitasnya sehingga mengungguli yang lain. Dengan berkonsentrasi pada perbaikan masalah yang ada dan meningkatkan manajemen organisasi, kami akan dapat mengoordinasikan setiap masalah yang ditangani untuk mengembangkan inovasi, meningkatkan akurasi, dan memperkuat tim manajemen yang bekerja dengan pemasok, pelanggan, dan Districtside.

Sejak didirikan empat tahun lalu, Kip Store telah mengandalkan banyak pelanggan dan pemasok untuk memastikan kesuksesannya yang berkelanjutan di industri ritel pakaian. Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi apotek untuk terus mempertahankan kesuksesannya di industrinya dengan melimpahnya pelanggan baik di dalam maupun di luar Kota Bengkulu.

Semua hak dan tanggung jawab pemasok dan distributor Districtsides dilindungi oleh distro ini. Selain itu, perjanjian jual beli atau konsinyasi ini termasuk dalam jenis perjanjian nyata di mana ada pengiriman nyata selain kesesuaian wasiat. Artinya, perjanjian tersebut menjadi efektif ketika pemasok benar-benar mengirimkan barang ke Distro. Pemilik Distro mengaku telah memenuhi ketentuan perjanjian dan cukup untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan pemasok. Para pihak akan melaksanakan segala informasi, hak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan MoU ini.¹⁷

Namun, segala upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan perjanjian yang disepakati antara distributor dan pemasok dilaksanakan seefektif mungkin sehingga masing-masing pihak mendapatkan manfaat yang menjadi haknya. Namun, dalam praktiknya, konflik masih dapat timbul karena gagal bayar, atau kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban.

Distro Districtsides sering menerima barang cacat dari pemasok selama masa perjanjian, hal ini wajar karena kecerobohan pemasok dalam memasok barang. Kemudian, barang dagangan yang tidak sempurna kebetulan dibeli oleh pembeli yang akhirnya merasa kecewa dengan layanan Distro. Pusat distribusi Districtsides akan mengkompensasi kerugian dengan mengganti barang berkualitas tinggi jika kejadian ini terjadi.

Tentu saja, kejadian ini masuk dalam kategori wanprestasi, yaitu perbuatan yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. dengan mengacu pada kualitas barang yang diberikan kepada Kabupaten sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai. Tentunya standar kualitas yang tinggi harus dijaga oleh kedua belah pihak, pemasok yang memasok barang ke distro dan outlet distribusi yang menjual produk dari pemasok.¹⁸

Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dijelaskan secara rinci dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Districtsides berkewajiban

¹⁷ Dian, Selaku *Owner*, wawancara pada 29 juni 2024

¹⁸ Dian, Selaku *Owner*, wawancara pada 29 juni 2024

berdasarkan perjanjian ini untuk menawarkan dan menjual produk dari pemasok kepada pelanggan. Sementara itu, penyedia diharuskan untuk mengirimkan produk tepat waktu dengan kontrol kualitas barang yang baik. Selain itu, distributor dan penyedia selama masa perjanjian harus memenuhi hak dan komitmennya secara akurat dan benar, profil perusahaan dan informasi produk berupa konsep, jenis produk, bahan, dan kapasitas produksi harus disediakan oleh pelaku usaha.

Pihak yang melanggar kontrak harus menerima konsekuensi berikut atas wanprestasi yang dilakukan oleh pemasok atau distributor: tanggung jawab atas wanprestasi tersebut. Kewajiban pelaku usaha tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 19, yaitu;¹⁹

1. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, polusi, atau kerugian akibat mengonsumsi produk atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.

2. Kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian atau pengembalian barang dan/atau jasa dengan jenis yang sama atau nilai yang setara, atau pelayanan kesehatan dan/atau pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompensasi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pembayaran dilakukan sebagai

Conclusion

Setelah mempelajari banyak hal tentang kegiatan konsinyasi antara supplier dan KIP Store Bengkulu beserta penjelasan dan deskripsi. Di sini dapat disimpulkan dari penelitian bahwa:

1. Perjanjian lisan, bukan kontrak tertulis, menjadi dasar hukum perjanjian konsinyasi yang ditandatangani di KIP Store Bengkulu. Namun, meskipun perjanjian konsinyasi KIP Store tidak memuat pernyataan tertulis mengenai poin-poin utama, bentuk perjanjian tersebut sudah standar karena KIP Store memutuskan poin-poin utama, dan Supplier hanya memiliki pilihan untuk "mengambilnya atau meninggalkannya". yang berarti setuju untuk menandatangani kontrak atau menolak untuk menandatangani kontrak.

Karena dominasi KIP Store dalam menentukan harga dasar, pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara supplier dan distributor di KIP Store tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang menjelaskan perlunya suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur dan digunakan dalam kasus-kasus yang terjadi di luar perjanjian. Karena perjanjian keamanan dengan KIP Store tidak termasuk dominasi sepihak, kasus tersebut terjadi di luar kesepakatan. Selain itu, para pihak telah menyetujui perjanjian tersebut secara lisan.

2. Sebagai penjual langsung barang kepada konsumen, KIP Store Bengkulu sebenarnya tidak menanggung perlindungan hukum yang diberikan kepada pemasok jika terjadi kerusakan barang yang disebabkan oleh pelanggan atau memakan waktu lama. Perjudian lebih lanjut (kerusakan barang oleh pembeli atau penggunaan waktu)

¹⁹ Dian, selaku owner, wawancara 29 juni

sebenarnya bukan kewajiban KIP Store Bengkulu meskipun sebenarnya merupakan kewajiban KIP Store Bengkulu. karena KIP Store akan memberlakukan aturan bagi pelanggan yang menyatakan bahwa barang yang rusak adalah tanggung jawab pelanggan dan harus membelinya. Produk hanya akan dikembalikan jika rusak seiring waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- ' Sri Rahayu, "*Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada Pt. Down To Earth.*", *Jurnal Analisis Hukum*, vol. 1, No. 2 (2018), 240-254.
- ' Kasiyanto Agus, *Mahir Merancang Kontrak*, Bandung: Eureka Media Aksara, 2022.
- Sutrawaty, Laras. "*Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata.*" *Jurnal Legal Opinion*, vol. 4, no. 3, 2016.
- Mas"ud Machfoedz, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011, hlm 55
- Hadori Yunus Harmanto, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm 129
- Waluyo Jati "*Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) Dengan Supplier.*" PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Darsono, *Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993
- Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*" (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.
- Pasal 1320 KUHPerdata
- Pasal 1321 KUH Perdata
- Pasal 1329 KUH Perdata
- Pasal 1333 KUH Perdata
- Rezha,Bagian Inventory,wawancara pada 29 juni 2024
- UG JURNAL VOL.15 Edisi 04 April 2021, hlm14
- Dian,Selaku *Owner* ,wawancara pada 29 juni 2024
- Dian,Selaku *Owner* ,wawancara pada 29 juni 2024
- Dian,selaku owner, wawancara 29 juni